



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**



**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA – PD)
KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2022**



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang
 - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pematang
 - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang
 - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
 - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
 - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pematang
 - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG**

KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG

Nomor : 050 / 13 / TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**

CAMAT BANTARBOLANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang;
32. Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang;
33. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
35. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenanga Bupati Kepada Camat;
36. Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang;
37. Peraturan Bupati Pematang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pematang;
38. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022
39. Peraturan Bupati Pematang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT BANTARBOLANG TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANTARBOLANG TAHUN 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bantarbolang yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2022, merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pematang Tahun 2021-2026 dan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2022.

Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Bantarbolang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarbolang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022

BAB V : Penutup

Pasal 3

Isi, uraian dan perincian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Camat Bantarbolang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANTARBOLANG
pada Tanggal : JUNI 2021


CAMAT BANTARBOLANG

Drs. ABDUL RACHMAN, M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 199003 1 005

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang ;
2. Kepala BKAD Kab. Pemalang ;
3. Kepala Bappeda Kab. Pemalang ;
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang ;
5. Anggota Tim yang bersangkutan ;
6. A r s i p .



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN BANTARBOLANG

KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG

Nomor : 050 / 14 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

CAMAT BANTARBOLANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Bantarbolang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bantarbolang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 23 Tahun Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3):
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang;
34. Peraturan Bupati Pematang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pematang;
35. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
36. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
37. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenanga Bupati Kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang;

39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022
41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah:
- a. mengumpulkan dan memverifikasi data yang diperlukan dalam penyusunan Renja PD;
 - b. melakukan penyusunan Renja PD;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Tim sebagai bahan masukan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA** : Tim Penyusun Renja PD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Bantarbolang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANTARBOLANG
pada Tanggal : 01 JULI 2021



CAMAT BANTARBOLANG

Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19691128 199003 1 005


TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Pemalang ;
 2. Kepala BKAD Kab. Pemalang ;
 3. Kepala Bappeda Kab. Pemalang ;
 4. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Setcam Bantarbolang ;
 5. Anggota Tim yang bersangkutan ;
 6. A r s i p .
-


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANTARBOLANG
 NOMOR : 050/14/TAHUN 2021
 TANGGAL : 01 JULI 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BANTARBOLANG
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Penanggungjawab	Camat Bantarbolang	
2	Ketua	Sekcam	
3	Sekretaris	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	
4	Anggota	Kasi Tata Pemerintahan	
5	Anggota	Kasi PMD	
6	Anggota	Kasi Trantibum	
7	Anggota	Kasi Pelayanan	
8	Anggota	Plt Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
9	Anggota	Pelaksana	Kahari, S.IP
10	Anggota	Pelaksana	Widyaningsih, A. Md
11	Anggota	Pelaksana	Fatchrur Roji



 CAMAT BANTARBOLANG



Drs. ABDUL RACHMAN, M.Si

 Pembina Tk. I

 NIP. 19691128 199003 1 005001

Alamat : Jl. Raya Bantarbolang No. 17 Kode Pos 52352
 Email : Bantarbolangbtg@yahoo.com

LAMPIRAN
PERATURAN CAMAT BANTARBOLANG NOMOR 050/14/TAHUN 2021
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022. Renja Kecamatan Bantarbolang merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Bantarbolang yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Bantarbolang melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2022. Renja Kecamatan Bantarbolang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Bantarbolang mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Bantarbolang mengingat :

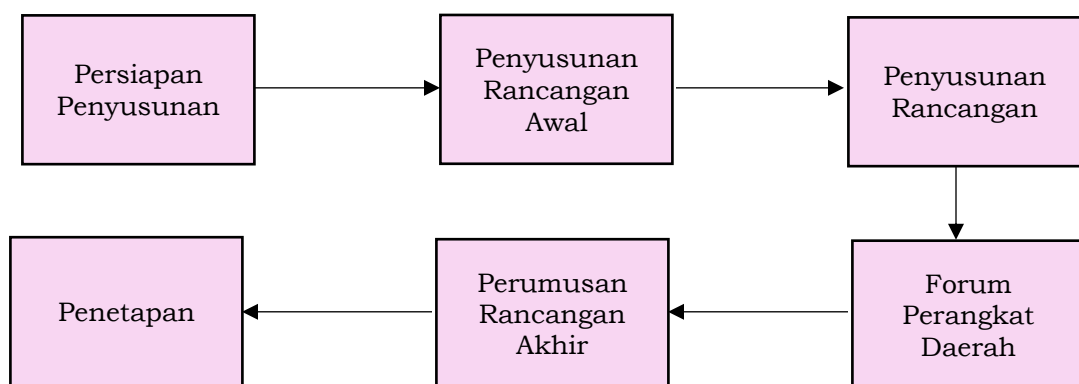
1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Bantarbolang dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Bantarbolang untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan

4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

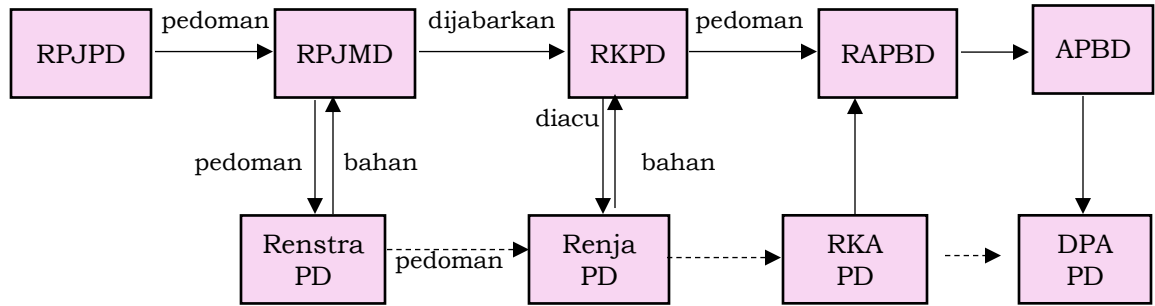
1. Persiapan penyusunan
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022
 - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2020, pengendalian kegiatan tahun 2020, dan RKPD tahun 2022)
2. Penyusunan rancangan awal
 - Koordinasi dengan Seksi-seksi
 - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
 - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022
 - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Bantarbolang
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022
 - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
 - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang
Tahun 2022



Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Bantarbolang tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2022 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2
Keterkaitan Renja PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Bantarbolang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang tahun 2022, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
 34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
 35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
 37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
 38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
 39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
 40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
 41. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Bantarbolang tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Bantarbolang;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Bantarbolang tahun 2022;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2020, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2020 dan capaian Renstra Kecamatan Bantarbolang, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bantarbolang, berisi tentang kerangka pendanaan tahun 2022 serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BANTARBOLANG
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Bantarbolang

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Bantarbolang pada tahun 2020 dan estimasi tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2020

Jumlah anggaran Kecamatan Bantarbolang sebesar Rp1.081.739.000,00 yang terbagi dalam 6 program dan 39 kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp1.064.383.000,00 atau sebesar 98,40%.

Tahun Anggaran 2021 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Bantarbolang sebesar Rp3.447.892.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Karena adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran, maka anggaran di Kecamatan Bantarbolang mengalami pengurangan sebesar Rp200.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.247.892.000,00 yang terbagi dalam 6 program, 13 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp1.479.911.336,00 atau sebesar 45,57%.

Berdasar hasil evaluasi RKPD tahun 2020, Kecamatan Bantarbolang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Tidak terdapat realisasi capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan Tahun 2020

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Bantarbolang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada 	Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dalam 1 tahun sebanyak 600 surat sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 12 bulan sebanyak 3 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terurusnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Dinas dalam 1 tahun sebanyak 11 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor dalam 12 bulan sebanyak 4 orang sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dalam 12 bulan sebanyak 66 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya dokumen yang digandakan dalam 1 tahun sebanyak 30.876 lembar sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dalam 12 bulan sebanyak 10 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga sebanyak 2 jenis sesuai kebutuhan	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan dalam 12 bulan sebanyak 2 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, kegiatan rapat/kegiatan lain yang memadai dalam 12 bulan sebanyak 3 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Rapat-rapat koordinasi dan	Terpenuhinya kegiatan rapat dan koordinasi di dalam dan di luar daerah	Kegiatan terselesaikan sesuai target

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
konsultasi di dalam dan ke luar daerah	dalam 1 tahun sebanyak 20 kali sesuai target	
Penyediaan jasa keamanan	Terjaganya keamanan gedung kantor dalam 12 bulan sebanyak 4 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Bantarbolang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada 	Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan
Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur sebanyak 2 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pengadaan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik sebanyak 3 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pengadaan lemari besi dan filling cabinet	Terpenuhinya kebutuhan filling cabinet sebanyak 1 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah dinas dalam 1 tahun mencapai 1 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor dalam 1 tahun mencapai 3 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dalam 12 bulan sebanyak 11 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebeleur dalam 12 bulan sebanyak 15 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin komputer dan perlengkapannya dalam 12 bulan sebanyak 21 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Terpenuhinya pemeliharaan alat-alat elektronik dalam 12 bulan sebanyak 3 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir dan area publik kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin tempat parkir dan area publik kantor dalam 1 tahun sebanyak 1 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala pagar pembatas lingkungan kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin pagar pembatas lingkungan kantor dalam 1 tahun sebanyak 1 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	• Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia mencapai 100% sesuai target	Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
Capaian Kinerja dan Keuangan	• Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Bantarbolang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) sebanyak 1 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	• Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Bantarbolang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada	Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD dalam satu tahun sebanyak 4 dokumen sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dalam 1 tahun mencapai 1 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	• Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Bantarbolang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada	Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi sebanyak 12 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Terselenggaranya kegiatan koordinasi kecamatan dan desa sebanyak 4 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/ kelurahan	Terselenggaranya kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di tingkat kecamatan sebanyak 2 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pembinaan penggunaan ADD dan DD	Tersusunnya laporan penggunaan ADD dan DD sebanyak 12 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 17 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Fasilitasi penyelenggaraan Pilkades	Terlaksana penyelenggaraan Pilkades mencapai 1 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Klarifikasi Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	Tersusunnya laporan klarifikasi Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebanyak 17 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Fasilitasi pelaksanaan hasil Musrenbang	Tersusunnya laporan pelaksanaan hasil musrenbang sebanyak 1 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan	Terselenggaranya fasilitasi partisipasi masyarakat bidang pemerintahan dalam 12 bulan di 17 desa sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Program pengembangan kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan mencapai 12 bulan sesuai target • Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Bantarbolang dengan didukung SDM dan sarpras yang ada 	Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan
Pembinaan kelembagaan	Terlaksananya pembinaan kelembagaan sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	Terlaksana kegiatan tertib administrasi keuangan desa dalam 12 bulan sebanyak 17 desa sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target

Berdasar tabel 2.1, seluruh capaian program/kegiatan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2020 maupun Renstra 2016-2021. Hal tersebut dikarenakan:

1. Komitmen pemimpin di Kecamatan Bantarbolang untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. SDM di Kecamatan Bantarbolang cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bantarbolang;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP ;
4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
5. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Bantarbolang s/d Tahun 2021 Kabupaten Pematang

Perangkat Daerah : Kecamatan Bantarbolang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016- 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan									
4.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	100%
4.11.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	3600 surat	2400 surat	600 surat	600 surat	100%	600 surat	3600 surat	100%
4.11.01.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik kantor	3 Jenis/72 bulan	3 Jenis/48 bulan	3 Jenis/12 bulan	3 Jenis/12 bulan	100%	3 Jenis/12 bulan	3 jenis/72 bulan	100%
4.11.01.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda empat dan roda dua yang diperpanjang pajaknya	11 unit/6 tahun	11 unit/4 tahun	11 unit/1 tahun	11 unit/1 tahun	100%	11 unit/1 tahun	11 unit/6 tahun	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.01.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	3 orang/72 bulan	3 orang/48 bulan	3 orang/12 bulan	3 orang/12 bulan	100%	3 orang/12 bulan	3 orang/72 bulan	100%
4.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah persediaan ATK selama 1 tahun	10 Jenis/72 bulan	10 jenis/48 bulan	10 jenis/12 bulan	10 jenis/12 bulan	100%	10 jenis/12 bulan	10 jenis/72 bulan	100%
4.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan	30.000 lembar	20.000 lembar	5.000 lembar	5.000 lembar	100%	5.000 lembar	30.000 lembar	100%
4.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangannya bangunan kantor yang tersedia	10 Jenis/72 bulan	10 jenis/48 bulan	10 jenis/12 bulan	10 jenis/12 bulan	100%	10 jenis/12 bulan	10 jenis/72 bulan	100%
4.11.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan kelengkapan Kantor yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	1 jenis	4 jenis	100%
4.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis/72 bulan	2 jenis/48 bulan	2 jenis/12 bulan	2 jenis/12 bulan	100%	2 jenis/12 bulan	2 jenis/72 bulan	100%
4.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai	3 jenis/72 bulan	3 jenis/48 bulan	3 jenis/12 bulan	3 jenis/12 bulan	100%	3 jenis/12 bulan	3 jenis/72 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	120 kali	80 kali	20 kali	20 kali	100%	20 kali	120 kali	100%
4.11.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung yang terjaga keamanannya	4 unit/72 bulan	4 unit/48 bulan	4 unit/12 bulan	4 unit/12 bulan	100%	4 unit/12 bulan	4 unit/72 bulan	100%
4.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	4 unit	2 unit	-	-	-	2 unit	4 unit	100%
4.11.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang disediakan	5 unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100%
4.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	5 unit	5 unit	-	-	-	-	5 unit	100%
4.11.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang disediakan	3 unit	3 unit	-	-	-	-	3 unit	100%
4.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	3 unit	3 unit	-	-	-	-	3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	3 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	-	3 unit	100%
4.11.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah Komputer / Laptop, Printer dan Perlengkapannya	3 unit	2 unit	-	-	-	1 unit	3 unit	100%
4.11.02.12	Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	15 unit	8 unit	4 unit	4 unit	100%	3 unit	15 unit	100%
4.11.02.13	Pengadaan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	3 unit	1 unit	-	-	-	2 unit	3 unit	100%
4.11.02.14	Pengadaan lemari besi dan felling cabinet	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang tersedia	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	-	2 unit	100%
4.11.02.16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang di bangun	1 unit	1 unit	-	-	100%	-	1 unit	100%
4.11.02.17	Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dibangun	1 unit	1 unit	-	-	100%	-	1 unit	100%
4.11.02.21	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit/6 tahun	1 unit/4 tahun	1 unit/1 tahun	1 unit/1 tahun	100%	1 unit/1 tahun	1 unit/6 tahun	100%
4.11.02.22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit/6 tahun	3 unit/4 tahun	3 unit/1 tahun	3 unit/1 tahun	100%	3 unit/1 tahun	3 unit/6 tahun	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda empat dan roda dua yang dipelihara	11 unit/72 unit	11 unit/48 unit	11 unit/12 bulan	11 unit/12 bulan	100%	11 unit/12 bulan	11 unit/72 bulan	100%
4.11.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah meubeleur kantor yang dipelihara	3 jenis/72 bulan	3 jenis/48 bulan	3 jenis/12 bulan	3 jenis/12 bulan	100%	3 jenis/12 bulan	3 jenis/72 bulan	100%
4.11.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	21 unit/72 bulan	21 unit/48 bulan	21 unit/12 bulan	21 unit/12 bulan	100%	21 unit/12 bulan	21 unit/72 bulan	100%
4.11.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara	3 jenis/72 bulan	3 jenis/48 bulan	3 jenis/12 bulan	3 jenis/12 bulan	100%	3 jenis/12 bulan	3 jenis/72 bulan	100%
4.11.02.36	Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir dan area publik kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang dipelihara	1 unit/6 tahun	1 unit/4 tahun	1 unit/1 tahun	1 unit/1 tahun	100%	1 unit/1 tahun	1 unit/6 tahun	100%
4.11.02.37	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dipelihara	1 unit/6 tahun	1 unit/4 tahun	1 unit/1 tahun	1 unit/1 tahun	100%	1 unit/1 tahun	1 unit/6 tahun	100%
4.11.02.41	Rehabilitasi sedang/berat	Jumlah rumah dinas yang di rehabilitasi	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	100%
4.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang di rehabilitasi	3 unit	2 unit	-	-	-	1 unit	3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang di rehabilitasi	1 unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	100%
4.11.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	6 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	6 laporan	100%
4.11.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	6 laporan	100%
4.11.09	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.11.09.01	Penyusunan database perencanaan SKPD	Jumlah dokumen data base perencanaan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	24 dokumen	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	24 dokumen	100%
4.11.09.05	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang diselenggarakan	6 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	6 kegiatan	100%
4.11.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.11.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun	72 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	72 laporan	100%
4.11.15.12	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang difasilitasi	12 laporan	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	100%
4.11.15.13	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Jumlah kegiatan koordinasi kecamatan dan desa yang dilaksanakan	24 kegiatan	16 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	24 kegiatan	100%
4.11.15.14	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	Jumlah hari-hari besar nasional dan hari jadi Kab. Pematang Jaya dengan baik	12 kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	12 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.15.15	Pembinaan penggunaan dana ADD dan Dana Desa	Jumlah laporan penggunaan ADD dan Dana Desa yang tersusun	72 laporan	48 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	72 laporan	100%
4.11.15.16	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah laporan LPPDesa yang tersusun baik dan benar serta tepat waktu	102 laporan	68 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	102 laporan	100%
4.11.15.17	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kegiatan fasilitasi PATEN	6 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	6 kegiatan	100%
4.11.15.19	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Jumlah laporan pemilihan kepala desa di Kec. Bantarbolang	3 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	-	3 laporan	100%
4.11.15.20	Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Jumlah laporan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDesa	102 laporan	68 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	102 laporan	100%
4.11.15.21	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembangunan hasil musrenbang	6 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	6 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.15.24	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bintek untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman aparatur pemerintah desa	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi partisipasi masyarakat bidang pemerintahan	Jumlah desa yang difasilitasi partisipasi masyarakat bidang pemerintahan	17 desa/72 bulan	17 desa/48 bulan	17 desa/12 bulan	17 desa/12 bulan	100%	17 desa/12 bulan	17 desa/72 bulan	100%
4.11.16	Program Pengembangan Kewilayahan	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.11.16.01	Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan	Jumlah Ijin yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.16.03	Pembinaan kelembagaan	Jumlah kegiatan pembinaan kelembagaan di Kecamatan Bantarbolang	2 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2 kegiatan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.11.16.04	Penyusunan database	Jumlah dokumen penataan dan evaluasi database kemiskinan yang disusun.	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.16.07	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	jumlah penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	17 desa/36 bulan	17 desa/12 bulan	17 desa/12 bulan	17 desa/12 bulan	100%	17 desa/12 bulan	17 desa/36 bulan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang Tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi Tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantarbolang

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai LKJIP/SAKIP	Nilai	-	√	-	47,00	37,50	38,50	39,00	36,33		38,50	39,00	
2	Persentase penyerapan anggaran	%	-	√	-	96	96	-	-	98,40		-	-	
3	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	-	√	-	84	84	-	-	88,24		-	-	
4	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	-	√	-	83	83	-	-	83		-	-	
5	Persentase penanganan pengaduan masyarakat/Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	-	√	-	83	100	100	100	100		100	100	
6	Nilai SKM/Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	√	-	78	78	80	82	78		80	82	
7	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	12		-	-	
8	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	12		-	-	
9	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%	-	-	√	100	100	-	-	100		-	-	
10	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%	-	-	√	100	100	-	-	100		-	-	
11	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	12		-	-	
12	Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	12		-	-	

No.	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Cakupan layanan kecamatan	%	-	√	-	-	94,29	94,49	94,69	94,09		94,49	94,69	
14	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	-	-	√	-	36,50	37,50	38,00	35,87		37,50	38,00	
15	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	-	-	√	-	92,22	92,22	92,22	92,22		92,22	92,22	
16	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	-	-	√	-	100	100	100	100		100	100	
17	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	-	-	√	-	76,67	76,67	76,67	76,67		76,67	76,67	
18	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	-	-	√	-	91	92	93	90	100	92	93	
19	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	-	√	-	100	100	100	100		100	100	
20	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	-	√	-	100	100	100	100		100	100	
21	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	-	-	√	-	88,24	88,24	88,24	88,24		88,24	88,24	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang adalah PD yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa, pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Bantarbolang berdasar Renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari :

- a. Nilai LKJiP
- b. Persentase penyerapan anggaran
- c. Persentase kelengkapan administrasi desa binaan
- d. Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
- e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- f. Nilai SKM
- g. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan
- h. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- i. Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia
- j. Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD
- k. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan
- l. Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Nilai LKJiP, dimana dari target sebesar 47,00 hanya tercapai sebesar 36,33. Hal tersebut disebabkan adanya inkonsistensi antar dokumen perencanaan yang ada (Renstra dan Renja) sehingga ke depan perlu lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Indikator selanjutnya adalah persentase penyerapan anggaran, walaupun hasil yang dicapai sudah melebihi target yaitu sebesar 98,40% tapi belum optimal karena belum mencapai 100%, sehingga perlu upaya peningkatan lebih lanjut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah indikator persentase kelengkapan administrasi desa binaan sebesar 88,24% atau sebanyak 15 desa dari 17 desa, yang artinya masih ada 2 desa di Kecamatan Bantarbolang yang belum tertib dan lengkap administrasi desanya sehingga perlu pendampingan lebih intens dari Kecamatan Bantarbolang. Indikator persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar 83%, sehingga perlu upaya dari Kecamatan Bantarbolang untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilaksanakan.

Sedangkan evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Bantarbolang berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2020, IKM Kecamatan Bantarbolang sebesar 78 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Bantarbolang. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, penanganan potensi konflik tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2020, cakupan layanan Kecamatan Bantarbolang tersebut mencapai 94,09% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Bantarbolang meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 23 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 766,67%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Capaian persentase masyarakat desa yang aktif sebesar 90% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa dan kecamatan ada yang tidak hadir, sehingga perlu didorong partisipasi masyarakat desa dan lembaga masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi

konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing-masing tercapai 100% tetap harus ditingkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Bantarbolang. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 88,24% yaitu sebanyak 15 desa dari 17 desa di Kecamatan Bantarbolang. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Bantarbolang.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2020, Kecamatan Bantarbolang mendapat nilai SAKIP sebesar 36,33 (kategori C) dan IRB sebesar 35,87 (kategori C) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Bantarbolang untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal ;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Sedangkan capaian dalam pengembangan SDM Kecamatan Bantarbolang pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM
Kecamatan Bantarbolang Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Permasalahan
	Program pengembangan kewilayahan				
1	Pembinaan kelembagaan	20,800,000	20,800,000	100	-
2	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	4,300,000	4,300,000	100	-

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Bantarbolang perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Bantarbolang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi
Kecamatan Bantarbolang

Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
1. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 6. Pengoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup	3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
7. Penyelenggaraan	4. Masih terdapat	4. Adanya perbedaan	4. Adanya FKDM dan

Tupoksi	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
urusan pemerintahan umum	potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa
9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja 7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran 7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat 7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Bantarbolang justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Adil

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Makmur

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

Agamis

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

Ngangeni

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong-royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing-masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Bantarbolang mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan program unggulan Kabupaten Pemalang, maka Kecamatan Bantarbolang mendukung program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi

diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”** dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 adalah **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2022, diarahkan pada **“percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat; perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi **Covid-19**.
- c. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.
- e. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan

masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.

f. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Kecamatan Bantarbolang mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan system perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal-hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Bantarbolang adalah :

1. Dampak global dari pandemi Covid 19 yang menyebabkan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan pendapatan mengakibatkan potensi menurunnya kinerja tahun 2022.
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan system e-planning dan e-budgeting.

3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
 - Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

- Peraturan Bupati Pematang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pematang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh Kecamatan Bantarbolang.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing-masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjangkaran masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Bantarbolang dalam melaksanakan kegiatan kewilayahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pematang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang tahun 2022, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;

3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Bantarbolang adalah sebagai berikut:

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Bantarbolang, telaah visi misi dan program prioritas Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Bantarbolang yaitu **“Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Bantarbolang”**. Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bantarbolang

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan
2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah	4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin
5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang. Renja Kecamatan Bantarbolang disusun dengan berpedoman pada Rancangan

Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Bantarbolang dengan mempertimbangkan faktor 5M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Method* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Material* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang tercantum dalam matrik rancangan awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 perlu disesuaikan dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Bantarbolang.

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok-pokok Pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2022 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.8
Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	NIHIL				

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	bantarbolang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	45 skor	2.531.031.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	bantarbolang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	46,89 skor	2.679.247.535	
								Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor		
1.1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bantarbolang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	45 skor	9.135.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 dok	7.500.000	
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 dokumen	2.445.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dok	1.500.000	
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bantarbolang	Jumlah dokumen RKA yang disusun	1 dokumen	1.115.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bantarbolang	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	
1.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bantarbolang	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1 dokumen	1.115.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bantarbolang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	
1.1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bantarbolang	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bantarbolang	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	
1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bantarbolang	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bantarbolang	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	
1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 dokumen	1.115.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 dok	1.000.000	
1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	1.115.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dok	1.000.000	
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bantarbolang	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	45 skor	1.574.175.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	14 dok	2.004.453.300	
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bantarbolang	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	17 orang/14 bulang	1.568.095.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bantarbolang	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	17 orang/14 bin	2.000.774.000	
1.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dok	1.999.700	
1.2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	11 dokumen	3.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	11 dok	1.000.000	
1.2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bantarbolang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dokumen	680.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	bantarbolang	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dok	679.600	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor	72.795.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	2 dok	1.795.000	
1.3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bantarbolang	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	1 dokumen	680.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bantarbolang	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	1 dok	680.000	
1.3.2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan barang milik daerah SKPD yang tersusun	1 dokumen	1.115.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bantarbolang	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	1 dok	1.115.000	
1.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor	38.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	20 orang	6.000.000	
1.4.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bantarbolang	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	35 stel	28.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bantarbolang	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	-	-	
1.4.2.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 orang/1 kegiatan	5.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 orang/1 keg	3.000.000	
1.4.3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 orang/1 kegiatan	5.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 orang/1 keg	3.000.000	
1.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor	266.526.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	bantarbolang	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5 layanan	85.026.000	
1.5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bantarbolang	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis/12 bulan	7.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bantarbolang	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis/12 bln	3.500.000	
1.5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bantarbolang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	5.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bantarbolang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	4.000.000	
1.5.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bantarbolang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	4.526.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bantarbolang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	4.526.000	
1.5.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bantarbolang	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis/12 bulan	250.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bantarbolang	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis/12 bln	50.000.000	
1.5.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bantarbolang	Jenis barang cetakan yang tersedia	3 jenis/12 bulan	15.815.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bantarbolang	Jenis barang cetakan yang tersedia	3 jenis/12 bln	5.000.000	
			Jumlah penggandaan yang tersedia	29630 lembar				Jumlah penggandaan yang tersedia	29630 lbr		
1.5.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah surat kabar yang tersedia	1 jenis/12 bulan	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia	-	3.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jenis surat kabar yang tersedia	1 jenis/12 bln		
1.5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bantarbolang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	2 kegiatan	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bantarbolang	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	2 keg	15.000.000	
1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor	63.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bantarbolang	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	18 unit	139.507.700	
1.6.1.	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	3.000.000	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	bantarbolang	-	-	-	
1.6.2.	Pengadaan Mebel	bantarbolang	Jumlah mebel yang tersedia	10 unit	10.000.000	Pengadaan Mebel	bantarbolang	Jumlah mebel yang tersedia	10 unit	80.339.000	
1.6.3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 unit	50.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 unit	59.168.700	
1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor	296.400.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bantarbolang	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	3 jasa	274.500.000	
1.7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bantarbolang	Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 surat	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bantarbolang	Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 surat	3.000.000	
1.7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bantarbolang	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rekening/12 bulang	31.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bantarbolang	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rek / 12 bl	16.500.000	
1.7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bantarbolang	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	17 orang/12 bulang	259.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bantarbolang	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	17 orang/12 bl	255.000.000	
1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bantarbolang	Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor	211.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bantarbolang	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	68 unit	160.465.535	
1.8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	10 unit	81.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bantarbolang	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	10 unit	57.461.535	
1.8.2.	Pemeliharaan Mebel	bantarbolang	Jumlah mebel yang terpelihara	20 unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	bantarbolang	Jumlah mebel yang terpelihara	20 unit	5.000.000	
1.8.3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	32 unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bantarbolang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	32 unit	5.360.000	
1.8.4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bantarbolang	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	3 unit	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bantarbolang	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 unit	82.644.000	
1.8.5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bantarbolang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bantarbolang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bantarbola ng	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bantarbola ng	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	bantarbola ng	Persentase Pelayanan Publik yang Tersedia	92,22%	83.550.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	bantarbola ng	Persentase pelayanan publik yang tersedia	92,22%	19.650.000	
2.1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bantarbola ng	Jenis data pemerintah yang dipublikasi	1 data	10.200.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	bantarbola ng	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi	1 data	6.000.000	
2.1.1.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha di Tingkat Kecamatan	bantarbola ng	Jenis data pemerintah yang termutakhirkan	1 data	10.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha di Tingkat Kecamatan	bantarbola ng	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	1 data	6.000.000	
2.2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	bantarbola ng	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 kasus	14.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	bantarbola ng	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 kasus	8.400.000	
2.2.1.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	bantarbola ng	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	35 peraturan	5.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	bantarbola ng	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	35 peraturan	3.000.000	
								Jumlah maklumat pelayanan terpadu kecamatan yang tersusun	-	-	
2.2.2.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bantarbola ng	Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi	10 layanan	5.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	bantarbola ng	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	10 layanan	3.000.000	
2.2.3.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bantarbola ng	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	4 kasus	4.800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bantarbola ng	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	4 kasus	2.400.000	
2.3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	bantarbola ng	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	1 unit	17.000.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	bantarbola ng	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara	-	-	
2.3.1.	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bantarbola ng	Jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara	1 unit	17.000.000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	bantarbola ng	Jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara	-	-	
2.4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	bantarbola ng	Jumlah pelayanan berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	76,67%	41.550.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	bantarbola ng	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	23 kewenangan	5.250.000	
2.4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bantarbola ng	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	24.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	bantarbola ng	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	2.500.000	
2.4.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha yang terkait dengan Nonperizinan	bantarbola ng	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	17 dokumen	17.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha yang terkait dengan Nonperizinan	bantarbola ng	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	17 dokumen	2.750.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	800 surat		nonperizinan		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	800 surat		
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	bantarbolang	Persentase Masyarakat Desa yang Aktif	92%	76.980.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	bantarbolang	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	92%	19.121.600	
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	bantarbolang	Jumlah peserta musrenbang (desa + kecamatan)	120 orang	36.450.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	bantarbolang	Jumlah peserta Musrenbang	120 orang	17.121.600	
3.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	bantarbolang	Jumlah peserta sosialisasi musrenbang desa	60 orang	5.750.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	bantarbolang	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan	60 orang	2.500.000	
3.1.2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bantarbolang	Jumlah peserta musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	120 orang	24.950.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	bantarbolang	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	120 orang	12.121.600	
3.1.3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	5.750.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bantarbolang	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	-	2.500.000	
								Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga		
3.2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	1 lembaga	40.530.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	bantarbolang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	2.000.000	
3.2.1.	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	1 lembaga	36.030.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	bantarbolang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	-	-	
3.2.2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bantarbolang	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	30 orang	4.500.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	bantarbolang	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	30 orang	2.000.000	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	bantarbolang	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	20.520.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	bantarbolang	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	6.680.000	
4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	bantarbolang	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	34 orang	15.520.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	bantarbolang	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	34 orang	4.180.000	
4.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bantarbolang	Jumlah peserta pelatihan Linmas	34 orang	15.520.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	bantarbolang	Jumlah peserta pelatihan Linmas	34 orang	4.180.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	bantarbolang	Jumlah Perda/Perbup yang dikoordinasikan penagakannya	5 peraturan	5.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	bantarbolang	Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penagakannya	5 peraturan	2.500.000	
4.2.1.	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bantarbolang	Jumlah Perda/Perbup yang dimonitoring	5 peraturan	5.000.000	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	bantarbolang	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	5 peraturan	2.500.000	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	bantarbolang	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	78.410.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	bantarbolang	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	12.735.865	
5.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bantarbolang	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	130 orang	78.410.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bantarbolang	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (orang)	130 orang	12.735.865	
5.1.1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemeritahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	bantarbolang	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2 dokumen	51.410.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemeritahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	bantarbolang	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2 dokumen	5.000.000	
5.1.2.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	50 orang	5.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	50 orang	2.000.000	
5.1.3.	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	4 kasus	4.000.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	bantarbolang	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	4 kasus	2.500.000	
5.1.4.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bantarbolang	Jumlah unsur Forkompimcam yang berkoordinasi	3 unsur/12 kegiatan	18.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	bantarbolang	Jumlah unsur Forkompimcam yg berkoordinasi	unsur/12 k	3.235.865	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	bantarbolang	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,24%	69.140.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	bantarbolang	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,24%	20.850.000	
6.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	bantarbolang	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	10 desa	69.140.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	bantarbolang	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	10 desa	20.850.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	17 desa/7 kegiatan	14.625.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	17 desa/7 keg	2.850.000	
6.1.2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	17 desa/1 kegiatan	7.065.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	17 desa/1 keg	2.500.000	
6.1.3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17 desa/1 kegiatan	7.065.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17 desa/1 keg	2.500.000	
6.1.4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 desa/1 kegiatan	15.100.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 orang/1 keg	2.500.000	
6.1.5.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	85 orang/1 kegiatan	7.065.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	bantarbolang	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	85 orang/1 keg	2.500.000	
6.1.6.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bantarbolang	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	10 surat	5.000.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	bantarbolang	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	10 surat	2.000.000	
6.1.7.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	17 desa/1 kegiatan	5.110.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	bantarbolang	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	17 desa/1 keg	2.000.000	
6.1.8.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bantarbolang	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	17 desa/1 kegiatan	5.110.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	bantarbolang	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	17 desa/1 keg	2.000.000	
6.1.9.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bantarbolang	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	51 orang/1 kegiatan	3.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	bantarbolang	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	51 orang/1 keg	2.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BANTARBOLANG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”**, dengan prioritas pembangunan pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Percepatan pembangunan infrastruktur dan Pemulihan ekonomi”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Pembangunan UMKM
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi local dalam mewujudkan KOTA INDUSTRI
5. Peningkatan kualitas pariwisata dalam konsep Desa Wisata (DEWI)

6. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur
7. Pembangunan kesehatan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang
8. Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2022 Kabupaten Pematang tersebut, Kecamatan Bantarbolang mendukung prioritas ke-8 yaitu pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang

Kecamatan Bantarbolang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing di bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Bantarbolang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang pelayanan publik, Kecamatan Bantarbolang secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 adalah **“Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bantarbolang sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Bantarbolang tahun 2022, adalah “**Meningkatnya pelayanan kecamatan**”. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bantarbolang tahun 2022 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	80,00
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	94,49

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2022, Kecamatan Bantarbolang merencanakan sebanyak 6 program, 18 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Bantarbolang dengan kebutuhan dana sebesar Rp 2.758.285.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bantarbolang
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi		46,89 skor 11,72 skor	2.679.247.535			45 skor	3.380.226.000
7.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		12 dok	7.500.000			12 dok	11,040,000
7.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun		3 dok	1.500.000	DTU-DAU		3 dok	2.445.000
7.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun		1 dok	1.000.000	DTU-DAU		1 dok	1.115.000
7.01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun		1 dok	1.000.000	DTU-DAU		1 dok	1.115.000
7.01.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun		1 dok	1.000.000	DTU-DAU		1 dok	1.115.000
7.01.01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun		1 dok	1.000.000	DTU-DAU		1 dok	1.115.000
7.01.01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun		4 dok	1.000.000	DTU-DAU		4 dok	3.020.000
7.01.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun		3 dok	1.000.000	DTU-DAU		1 dok	1.115.000
7.01.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun		14 dok	2.004.453.300			17 orang	2.410.561.000
7.01.01.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan		17 orang/14 bln	2.000.774.000	DTU-DAU		17 orang/1 bulan	2,404,481,000
7.01.01.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun		1 dok	1.999.700	DTU-DAU		1 dok	2.000.000
7.01.01.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun		11 dok	1.000.000	DTU-DAU		18 dok	3,400,000

7.01.01.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun		1 dok	679.600	DTU-DAU		1 dok	680.000
7.01.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun		2 dok	1.795.000			2 dok	1.795.000
7.01.01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun		1 dok	680.000	DTU-DAU		1 dok	680.000
7.01.01.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun		1 dok	1.115.000	DTU-DAU		1 dok	1.115.000
7.01.01.04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas		20 orang	6.000.000			20 orang	41.500.000
7.01.01.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia		-	-			35 stel	31.500.000
7.01.01.04.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		20 orang/1 keg	3.000.000	DTU-DAU		20 orang	5.000.000
7.01.01.04.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		20 orang/1 keg	3.000.000	DTU-DAU		20 orang	5.000.000
7.01.01.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia		5 layanan	85.026.000			8 orang	344.930.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		11 jenis/12 bln	3.500.000	DTU-DAU		11 jenis/12 bulan	7.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 unit	4.000.000	DTU-DAU		5 unit	5.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan		5 unit	4.526.000	DTU-DAU		5 unit	5.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia		3 jenis/12 bln	50.000.000	DTU-DAU		3 jenis/12 bulan	278.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jenis barang cetakan yang tersedia		3 jenis/12 bln	5.000.000	DTU-DAU		3 jenis/12 bulan	15,815,000
		Jumlah penggandaan yang tersedia		29630 lbr				25000 lembar	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia		-	3.000.000	DTU-DAU		10 buah	3.000.000
		Jenis surat kabar yang tersedia		1 jenis/12 bln				2 jenis/12 bulan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi		2 keg	15.000.000	DTU-DAU		2 jenis/240 kegiatan	30.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang tertata		-	-			1 jenis	1.115.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia		18 unit	139.507.700			18 unit	63.000.000

	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-		-	-			1 unit	3.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia		10 unit	80.339.000	DTU-DAU		10 unit	10.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia		5 unit	59.168.700	DTU-DAU		5 unit	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia		3 jasa	274.500.000			3 aktivitas	296.400.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim		1000 surat	3.000.000	DTU-DAU		1000 surat	6.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		3 rek / 12 bl	16.500.000	DTU-DAU		3 rek/12 bln	31,200,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan		17 orang/12 bl	255.000.000	DTU-DAU		17 orang/12 bl	259.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		68 unit	160.465.535			68 unit	211.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara		10 unit	57.461.535	DTU-DAU		10 unit	80.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara		-	-			1 unit	1.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara		20 unit	5.000.000	DTU-DAU		20 unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		32 unit	5.360.000	DTU-DAU		32 unit	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara		3 unit	82.644.000	DTU-DAU		3 unit	80.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara		1 unit	5.000.000	DTU-DAU		1 unit	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara		1 unit	5.000.000	DTU-DAU		1 unit	10.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia		92,22%	19.650.000			70%	176.750.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi		1 data	6.000.000			1 dok	20.400.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan		1 data	6.000.000	DTU-DAU		1 dok	20.400.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan		12 kasus	8.400.000			12 kasus	14.800.000

	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun		35 peraturan	3.000.000	DTU-DAU		35 dok	5,000,000
		Jumlah maklumat pelayanan terpadu kecamatan yang tersusun		-	-				
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi		10 layanan	3.000.000	DTU-DAU		10 orang	5.000.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani		4 kasus	2.400.000	DTU-DAU		12 kasus	4.800.000
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara		-	-			1 unit	100.000.000
	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas umum yang dipelihara		-	-			1 unit	100.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia		23 kewenangan	5.250.000			23 kewenangan	41,550,000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan		50 izin	2.500.000	DTU-DAU		50 izin	24.050.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun		17 dokumen	2.750.000	DTU-DAU		17 dokumen	17,500,000
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan		800 surat				800 surat	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif		92%	19.121.600			80%	83.230.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peserta Musrenbang		120 orang	17.121.600			120 orang	37.200.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan		60 orang	2.500.000	DTU-DAU		60 orang/1 keg	6.500.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan		120 orang	12.121.600	DTU-DAU		120 orang/keg	24,950,000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi		-	-	-	-	-	-
		Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi		1 lembaga	2.500.000	DTU-DAU		6 desa	5.750.000
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang difasilitasi		1 lembaga	2.000.000			1 lembaga	46.030.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi		-	-			1 lembaga	36.030.000

	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan		30 orang	2.000.000	DTU-DAU		30 orang	10.000.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan		100%	6.680.000			80%	55.000.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya		34 orang	4.180.000			34 orang	40.000.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas		34 orang	4.180.000	DTU-DAU		12 materi/34 orang	30.000.000
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah unsur tokoh agama dan masyarakat yang harmonis		-	-	DTU-DAU		3 unsur/1 keg	10.000.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya		5 peraturan	2.500.000			5 peraturan	15.000.000
	Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratura Perudang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring		5 peraturan	2.500.000	DTU-DAU		5 peraturan/keg	15,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani		100%	12.735.865			100%	123.315.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		130 orang	12.735.865			4 kasus	123.315.000
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemeritahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun		2 dokumen	5.000.000	DTU-DAU		2 kegiatan	85.315.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa		50 orang	2.000.000	DTU-DAU		50 orang	10.000.000
	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan		4 kasus	2.500.000	DTU-DAU		4 kasus	10.000.000

	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah unsur Forkompimcam yg berkoordinasi		3 unsur/12 keg	3.235.865	DTU-DAU		12 tema	18.000.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik		88,24%	20.850.000			58.82%	64,105,000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik		10 desa	20.850.000			10 desa	64.105.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades		17 desa/7 keg	2.850.000	DTU-DAU		17 desa/7 keg	14.625.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa		17 desa/1 keg	2.500.000	DTU-DAU		17 desa/1 keg	7.065.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		17 desa/1 keg	2.500.000	DTU-DAU		17 desa/1 keg	7.065.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		17 orang/1 keg	2.500.000	DTU-DAU		17 orang/1 keg	7.065.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa		85 orang/1 keg	2.500.000	DTU-DAU		85 orang/1 keg	7.065.000
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan		10 surat	2.000.000	DTU-DAU		10 surat	5.000.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)		17 desa/1 keg	2.000.000	DTU-DAU		17 desa/1 keg	5.110.000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa		17 desa/1 keg	2.000.000	DTU-DAU		17 desa/1 keg	5.110.000
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa		51 orang/1 keg	2.000.000	DTU-DAU		51 orang/1 keg	6.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BANTARBOLANG

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2022. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Bantarbolang yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

- e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- f. Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- i. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun kegiatan pengembangan SDM yang direncanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan Layanan Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	46,89 skor	2.679.247.535	45 skor	3.380.226.000	Kec Bantarbolang
				Indeks Reformasi Birokrasi	11,72 skor				
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	12 dok	7.500.000	12 dok	11,040,000	Kec Bantarbolang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dok	1.500.000	3 dok	2.445.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	1 dok	1.115.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	1 dok	1.115.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	1 dok	1.115.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000	1 dok	1.115.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 dok	1.000.000	4 dok	3.020.000	Kec Bantarbolang
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang	3 dok	1.000.000	1 dok	1.115.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun	14 dok	2.004.453.300	17 orang	2.410.561.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	17 orang/ 14 bln	2.000.774.000	7 orang/1 bula	2,404,481,000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dok	1.999.700	1 dok	2.000.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	11 dok	1.000.000	18 dok	3,400,000	Kec Bantarbolang
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dok	679.600	1 dok	680.000	Kec Bantarbolang
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	2 dok	1.795.000	2 dok	1.795.000	Kec Bantarbolang
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD (RKBU) yang tersusun	1 dok	680.000	1 dok	680.000	Kec Bantarbolang
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang tersusun	1 dok	1.115.000	1 dok	1.115.000	Kec Bantarbolang
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	20 orang	6.000.000	20 orang	41.500.000	Kec Bantarbolang
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	-	-	35 stel	31.500.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 orang/1 keg	3.000.000	20 orang	5.000.000	Kec Bantarbolang
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 orang/1 keg	3.000.000	20 orang	5.000.000	Kec Bantarbolang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	5 layanan	85.026.000	8 orang	344.930.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis/12 bln	3.500.000	1 jenis/12 bulan	7.000.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	4.000.000	5 unit	5.000.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 unit	4.526.000	5 unit	5.000.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis/12 bln	50.000.000	3 jenis/12 bulan	278.000.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Barang Cetakan dan Per	Jenis barang cetakan yang tersedia	3 jenis/12 bln	5.000.000	3 jenis/12 bulan	15,815,000	Kec Bantarbolang
				Jumlah penggandaan yang tersedia	29630 lbr		25000 lembar		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang tersedia	-	3.000.000	10 buah	3.000.000	Kec Bantarbolang
				Jenis surat kabar yang tersedia	1 jenis/12 bln		2 jenis/12 bulan		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang terfasilitasi	2 keg	15.000.000	2 jenis/240 kegiatan	30.000.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang tertata	-	-	1 jenis	1.115.000	Kec Bantarbolang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	18 unit	139.507.700	18 unit	63.000.000	Kec Bantarbolang
			Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	1 unit	3.000.000	Kec Bantarbolang
			Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	10 unit	80.339.000	10 unit	10.000.000	Kec Bantarbolang
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	5 unit	59.168.700	5 unit	50.000.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	3 jasa	274.500.000	3 aktivitas	296.400.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	1000 surat	3.000.000	1000 surat	6.000.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rek / 12 bl	16.500.000	3 rek/12 bln	31,200,000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	17 orang/12 bl	255.000.000	17 orang/12 bl	259.200.000	Kec Bantarbolang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	68 unit	160.465.535	68 unit	211.000.000	Kec Bantarbolang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	10 unit	57.461.535	10 unit	80.000.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan darat tak bermotor yang dipelihara	-	-	1 unit	1.000.000	Kec Bantarbolang
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	20 unit	5.000.000	20 unit	10.000.000	Kec Bantarbolang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	32 unit	5.360.000	32 unit	25.000.000	Kec Bantarbolang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	3 unit	82.644.000	3 unit	80.000.000	Kec Bantarbolang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	1 unit	5.000.000	Kec Bantarbolang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	1 unit	5.000.000	1 unit	10.000.000	Kec Bantarbolang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang tersedia	92,22%	19.650.000	70%	176.750.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang dipublikasi	1 data	6.000.000	1 dok	20.400.000	Kec Bantarbolang
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha di Tingkat Kecamatan	Jenis data pemerintahan yang termutakhirkan	1 data	6.000.000	1 dok	20.400.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 kasus	8.400.000	12 kasus	14.800.000	Kec Bantarbolang
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	35 peraturan	3.000.000	35 dok	5,000,000	Kec Bantarbolang
				Jumlah maklumat pelayanan	-	-			
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jenis pelayanan SPM yang terfasilitasi	10 layanan	3.000.000	10 orang	5.000.000	Kec Bantarbolang
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	4 kasus	2.400.000	12 kasus	4.800.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan fasilitasi pelayaan umum yang dipelihara	-	-	1 unit	100.000.000	Kec Bantarbolang
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah prasarana dan fasilitasi umum yang dipelihara	-	-	1 unit	100.000.000	Kec Bantarbolang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	23 kewenangan	5.250.000	23 kewenangan	41,550,000	Kec Bantarbolang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	2.500.000	50 izin	24.050.000	Kec Bantarbolang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintaha yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verval DTKS yang tersusun	17 dokumen	2.750.000	17 dokumen	17,500,000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	800 surat		800 surat		Kec Bantarbolang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	92%	19.121.600	80%	83.230.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peserta Musrenbang Desa	120 orang	17.121.600	120 orang	37.200.000	Kec Bantarbolang
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan	60 orang	2.500.000	60 orang/1 keg	6.500.000	Kec Bantarbolang
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	120 orang	12.121.600	120 orang/keg	24,950,000	Kec Bantarbolang
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	-	2.500.000	6 desa	5.750.000	Kec Bantarbolang
				Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga		-		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	2.000.000	1 lembaga	46.030.000	Kec Bantarbolang
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	-	-	1 lembaga	36.030.000	Kec Bantarbolang
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	30 orang	2.000.000	30 orang	10.000.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100%	6.680.000	80%	55.000.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	34 orang	4.180.000	34 orang	40.000.000	Kec Bantarbolang
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	34 orang	4.180.000	12 materi/34 orang	30.000.000	Kec Bantarbolang
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah unsur tokoh agama dan masyarakat yang harmonis	-	-	3 unsur/1 keg	10.000.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakkannya	5 peraturan	2.500.000	5 peraturan	15.000.000	Kec Bantarbolang
			Koordinasi/Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratura Perudang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	5 peraturan	2.500.000	5 peraturan/keg	15,000,000	Kec Bantarbolang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100%	12.735.865	100%	123.315.000	Kec Bantarbolang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional (orang)	130 orang	12.735.865	4 kasus	123.315.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemeritahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2 dokumen	5.000.000	2 kegiatan	85.315.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	50 orang	2.000.000	50 orang	10.000.000	Kec Bantarbolang
			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	4 kasus	2.500.000	4 kasus	10.000.000	Kec Bantarbolang
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah unsur Forkompimcam yg berkoordinasi	3 unsur/12 keg	3.235.865	12 tema	18.000.000	Kec Bantarbolang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	88,24%	20.850.000	58.82%	64,105,000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	10 desa	20.850.000	10 desa	64.105.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	17 desa/7 keg	2.850.000	17 desa/7 keg	14.625.000	Kec Bantarbolang

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp .	Target Kinerja	Rp .	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	17 desa/1 keg	2.500.000	17 desa/1 keg	7.065.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	17 desa/1 keg	2.500.000	17 desa/1 keg	7.065.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	17 orang/1 keg	2.500.000	17 orang/1 keg	7.065.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	85 orang/1 keg	2.500.000	85 orang/1 keg	7.065.000	Kec Bantarbolang
			Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	10 surat	2.000.000	10 surat	5.000.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	17 desa/1 keg	2.000.000	17 desa/1 keg	5.110.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	17 desa/1 keg	2.000.000	17 desa/1 keg	5.110.000	Kec Bantarbolang
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	51 orang/1 keg	2.000.000	51 orang/1 keg	6.000.000	Kec Bantarbolang

Tabel 4.2

Rencana Aksi Pengembangan SDM Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		
				Target	Anggaran (Rp)	Peserta
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	skor	46,89	6.000.000	
		Indeks Reformasi Birokrasi	skor	11,72		
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	orang	20	6.000.000	
1.1.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang/keg	20/1	3.000.000	PNS & WB Kantor Kec Bantarbolang
1.1.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang/keg	20/1	3.000.000	PNS & WB Kantor Kec Bantarbolang
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif	%	92	16.621.600	
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peserta Musrenbang	orang	120	14.621.600	
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbangdesa/kelurahan	orang	60	2.500.000	unsur desa dan kelurahan
2.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	orang	120	12.121.600	unsur desa, kelurahan & Kabupaten
2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang difasilitasi	lembaga	1	2.000.000	
2.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	orang	30	2.000.000	unsur desa, kelurahan & Kabupaten
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	100%		
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	orang	34	4.180.000	
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	34	4.180.000	Linmas se Kec Bantarbolang & Kabupaten
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	100	2.000.000	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	orang	130	2.000.000	
4.1.1	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	orang	50	2.000.000	unsur desa, kelurahan & Kabupaten
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	88,24	7.000.000	
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik	desa	10	7.000.000	
5.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/keg	17/1	2.500.000	unsur desa
5.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang/keg	85/1	2.500.000	unsur desa, kelurahan & Kabupaten
5.1.3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	orang/keg	51/1	2.000.000	unsur desa, kelurahan & Kabupaten

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Bantarbolang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.
2. Renja Kecamatan Bantarbolang memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Bantarbolang secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2022.